

**“PERAN ASSESSMENT DALAM MERANCANG PROGRAM PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT”
(HASIL ASSESSMENT DI ATAMBUA NTT)**

Drs. Suharsono, M.Si *

Sutarno**

email denharsono@yahoo.co.id, suharsono@atmajaya.ac.id

Unika Indonesia Atma Jaya

ABSTRAK

Pengabdian Pada Masyarakat pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam proses pendidikan di Perguruan Tinggi. Pengabdian Pada Masyarakat merupakan sarana untuk mengimplementasikan berbagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi sehingga mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Pengabdian Pada Masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Banyak ahli yang mengatakan bahwa ilmu akan memiliki makna jika mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Agar proses penerapan ilmu itu mampu memberikan manfaat bagi kebutuhan hidup manusia (masyarakat) maka diperlukan informasi atau data tentang berbagai kebutuhan masyarakat. Disinilah pentingnya “assessment” dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat tersebut. Assessment dilakukan terutama dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengamatan langsung (kunjungan ke lokasi), wawancara mendalam dengan narasumber terutama tokoh setempat dan dilanjutkan dengan diskusi serta wawancara dengan “contact persons”. Dengan demikian program pengabdian yang dirancang diharapkan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan (kebutuhan) masyarakat. Kali ini kami melakukan assessment di Atambua NTT dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Hasil assessment ini kami tindaklanjuti dengan merancang program “peningkatan profesionalisme” guru dan “kewirausahaan” berbasis keluarga dengan pembuatan tempe.

Kata kunci : Assessment, pemberdayaan, Kewirausahaan berbasis keluarga.

1. Pendahuluan

PPM-LPPM Unika Atma Jaya adalah salah satu unit yang merancang dan mengkoordinasikan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, fungsi dan tugas bertekad untuk melakukan kegiatan pemberdayaan pada masyarakat terutama di desa mitra secara berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di desa mitra (Lokalitas). Dengan demikian maka peran PPM diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (mitra). Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan karena faktanya dalam proses pembangunan yang dilakukan khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih menyisakan sekelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Dari periode pemerintahan orde lama hingga yang terbaru pemerintahan Jokowi-JK diluncurkan berbagai upaya pemberantasan kemiskinan. Dari program “nasionalisasi” pada periode pemerintahan orde lama, berbagai bentuk “inpres” pada periode orde baru hingga “Kartu Sehat”, “Kartu Sejahtera” pada periode sekarang pada dasarnya merupakan upaya-upaya penyempurnaan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kita semua sudah mengetahui bahwa persoalan kemiskinan yaitu “bagaimana mengentaskan atau mengatasi kemiskinan” bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggungjawab kita semua. Oleh karena itu pendekatannya harus melibatkan semua pihak yang terkait. Dari berbagai kajian tentang pembangunan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu terjadi justru sebagai akibat dari proses pembangunan yang tidak tepat. Seperti antara

lain dikatakan oleh Ginandjar Kartasasmita (1996:134-135) bahwa pemikiran-pemikiran pembangunan yang berorientasi pada pembangunan kerakyatan di Indonesia tidak banyak membawa hasil. Ketidakberhasilan ini karena pemikiran yang digunakan itu berasal dari pemikiran-pemikiran yang digunakan di negara Barat. Sebagai akibatnya dengan adanya pembangunan tersebut justru terjadi kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Pemikiran di atas dapat dijelaskan secara sederhana misalnya dalam sistem matapencaharian masyarakat Indonesia yang sebagian besar sebagai petani. Indonesia memiliki musim yang jauh berbeda, budaya yang juga berbeda, kondisi tanah dan luas kepemilikan tanah yang juga berbeda. Dengan berbagai macam perbedaan tersebut tentu saja tidak dapat diperlakukan sama. Demikian juga dikatakan oleh Horowitz dalam Moeljarto Tjokrowinoto (1996:8) bahwa negara-negara berkembang dalam usahanya untuk menyelesaikan persoalan ekonominya (kemiskinan) cenderung meniru apa yang dilakukan oleh negara-negara maju (*demonstration effect*). Peniruannya itu biasanya dilakukan dengan mengambil bagian-bagian yang dianggap baik dari berbagai yang telah berhasil diterapkan oleh negara-negara maju (*fusion effect*). Selain itu biasanya kurang memperhatikan segi waktu. Model-model seperti inilah yang kemudian dikenal dengan “budaya instan” yaitu suatu sikap dan perilaku yang cenderung ingin serba cepat dan kurang memperhatikan substansinya. Sebagai akibatnya maka banyak program-program pembangunan yang pada akhirnya terbengkalai, tidak terawat dan akhirnya rusak serta tidak bermanfaat atau tidak berdampak pada peningkatan mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat. Prof. Soebroto dalam acara pembukaan seminar tentang bagaimana memutus rantai kemiskinan di Indonesia yang diadakan di Bali pada bulan November 2014 yang lalu mengatakan sebagai berikut “Kita tidak perlu belajar jauh-jauh keluar negeri, lha wong dinegeri sendiri saja banyak yang bagus-bagus”. Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka penentasan kemiskinan di Indonesia dapat belajar atau melihat dari berbagai praktek atau pengalaman bangsa sendiri dalam mengatasi kemiskinan. Dalam kajian selanjutnya, disinilah pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sedangkan prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan “keserakahan”, “individual” sudah tidak cocok (relevan) lagi.

Para pakar telah mengembangkan konsep pembangunan dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasawarsa 80-an David Korten dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012:17) mengajukan konsep “pembangunan yang berpusat pada rakyat” (*people centered development*). Konsep ini pada dasarnya mengajak para “agen” atau “penggerak” pembangunan lebih memperhatikan atau berorientasi pada rakyat (masyarakat). Hal ini juga dapat dipahami bahwa program pembangunan harus dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan kepentingan dan potensi yang ada dalam masyarakat. Moeljarto Tjokrowinoto (1996:18) secara lebih rinci menggambarkan konsep tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
- 2) Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- 3) Memberikan toleransi variasi lokan dan oleh karenanya harus fleksibel.
- 4) Menekankan pada proses *social learning* yang didalamnya terdapat integrasi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas.
- 5) Melakukan proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi, LSM, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri.

Pendekatan dan strategi di ataslah yang pada dasarnya menjadi acuan PPM-LPPM Unika Atma Jaya dalam merancang, melaksanakan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di Atambua NTT.

2. Pemberdayaan dan Kemiskinan

Di atas telah dijelaskan bahwa upaya pemberantasan atau pengentasan kemiskinan telah dilakukan

sejak periode pemerintahan orde lama hingga sekarang namun toh hasilnya tetap saja masih banyak orang yang tetap miskin. Dalam berbagai diskusi disebutkan bahwa memberantas kemiskinan di muka bumi ini rasanya tidak mungkin, yang lebih penting bagaimana mengurangi angka atau jumlah kemiskinan dan terutama pada jurang kemiskinan. Jurang kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi dimana terdapat sebagian masyarakat yang berlebihan bahkan sangat berlebihan secara ekonomi dipihak lain terdapat masyarakat yang miskin bahkan sangat miskin yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Dari berbagai sumber dapat dipahami bahwa paling tidak ada dua pandangan tentang kemiskinan antara lain menurut Ginandjar Kartasasmita (1996:239-240) : (1) kemiskinan kultural dan (2) kemiskinan struktural. Kemiskinan cultural pada dasarnya menganggap bahwa masyarakat itu menjadi miskin karena secara budaya misalnya gaya hidup dan kebiasaan hidupnya memang miskin. Pada tingkat ini meskipun secara umum mereka kelihatan miskin, tetapi mereka tidak mau dikatakan sebagai orang miskin. Oleh karena itu secara logika kelompok ini cenderung lebih sukar diajak untuk meningkatkan tarap hidupnya. Sedangkan pandangan yang kedua, kemiskinan struktural menganggap bahwa masyarakat menjadi miskin karena adanya kebijakan yang tidak tepat. Menurut Dawam Rahardjo (Awan Setya Dewanta dkk., 1995:146-147) ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan dalam masyarakat yaitu :

- a. Kesempatan kerja. Seseorang menjadi miskin karena tidak memiliki pekerjaan (menganggur). Keadaan seperti ini pada gilirannya menyebabkan seseorang tidak memiliki penghasilan yang pada akhirnya orang tersebut tidak memiliki kemampuan.
- b. Upah di bawah standar minimum. Meskipun seseorang memiliki pekerjaan tetapi upahnya di bawah garis standar sementara pengeluarannya cukup tinggi juga pada akhirnya tidak memiliki kemampuan (secara ekonomis).
- c. Produktivitas kerja yang rendah. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani, sementara kemiskinan terjadi justru pada sektor ini.
- d. Ketiadaan aset. Rendahnya produktivitas, sempitnya pemilikan lahan pertanian mengakibatkan rendahnya penghasilan mereka dari sektor ini. Pada gilirannya mereka tidak mampu lagi untuk mengembangkan sektor pertanian, misalnya menyewa lahan.
- e. Diskriminasi. Masih adanya perbedaan perlakuan pengupahan khususnya antara wanita dengan pria, maka menyebabkan terjadinya ketimpangan penghasilan. Dengan rendahnya upah yang diberikan kepada wanita maka akan semakin kecil sumbangan kaum wanita untuk menopang kehidupan keluarganya.
- f. Tekanan harga. Dengan penghasilan yang rendah, sementara kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan rumah tangga selalu meningkat, maka pendapatan yang diperoleh akan semakin tidak bisa mengejar naiknya harga-harga tersebut. Pada tingkat ini maka perolehan pendapatan yang dibawah standar semakin menurun lagi nilainya.
- g. Penjualan tanah. Tanah dalam masyarakat agraris (pertanian) merupakan sarana kehidupan yang sangat vital. Meningkatnya pembangunan terutama sarana pembangunan fisik untuk kebutuhan perumahan (mewah), perkantoran, industri dan pusat-pusat bisnis modern (mal, supermal) dewasa ini yang cenderung tidak terkontrol memerlukan lahan yang sangat luas. Semakin terbatasnya lahan maka semakin tinggi permintaannya yang berakibat pada semakin tingginya harga tanah. Inilah yang membuat sebagian masyarakat lebih tergiur untuk menjual tanahnya kepada pengembang. Penjualan tanah inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab kemiskinan. Karena kurangnya kemampuan dalam mengelola uang hasil penjualan tanah, maka biasanya akan habis dalam jangka waktu yang tidak lama dan biasanya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak atau belum dibutuhkan. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan bekas pemilik tanah di pedesaan hanya menjadi "penonton" dan jatuh dalam kemiskinan.

Disinilah perlunya pemberdayaan bagi masyarakat agar mampu membangkitkan kembali gairah hidupnya menjadi masyarakat yang mandiri. Bangkit dari keterpurukan, mampu menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Totok Mardikanto dan

Poerwoko Soebiato (2012:19) pemberdayaan masyarakat sejak dasawarsa 1990-an diyakini sebagai model pembangunan alternatif atas pembangunan yang selama ini berorientasi pada pertumbuhan. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan biasanya cenderung padat modal, menggunakan teknologi tinggi, dikelola dengan tingkat efisiensi tinggi sehingga pencapaian tingkat keuntungan yang diinginkan (besar) menjadi lebih mudah terealisasi. Seperti juga dikatakan oleh Moeljarto (1996:8) dan Randy R.W dan Rian Nugroho (2002:30-32) bahwa penerapan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang cenderung sentralistik hasilnya disamping tidak memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi juga menimbulkan kesenjangan yang berujung pada kemiskinan itu sendiri. Selanjutnya dikatakan oleh Randy R.W dan Rian Nugroho (2002:30) bahwa penerapan konsep pemberdayaan masyarakat dimulai sejak 15 tahun yang lalu dan memasuki abad 20 telah banyak mempengaruhi berbagai kebijakan (pemerintah). Dalam berbagai diskusi disebutkan bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang mengetahui persoalan dan solusinya, bukan orang lain. Yang menjadi persoalan lebih pada bagaimana memberikan kemampuan (daya) kepada masyarakat untuk mengenali, mengangkat dan menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian maka proses pemberdayaan pada akhirnya akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi “pelaku utama” atau sering disebut sebagai “subyek” bukan “obyek” dalam pengentasan kemiskinan. Seperti dikatakan oleh Haryono Suyono dalam buku yang ditulis oleh Malik Ruslan dan Anwari WMK (2006:3) sebagai berikut :

“itulah mengapa, ‘pemberdayaan’ lalu menjadi kata kunci dalam proses-proses rumit pengentasan kemiskinan. Tanpa pemberdayaan terhadap kehidupan kaum miskin itu sendiri, maka dapat dipastikan pengentasan kemiskinan hanya menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu menimbulkan ketergantungan (dependensia) kalangan kaum miskin” .

Demikian juga dikatakan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012:19) bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan yang berpusat pada rakyat (masyarakat) intinya adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Selanjutnya dikatakan oleh Randy R.W dan Rian Nugroho (2002:75-76) bahwa pemberdayaan dalam arti memberdayakan masyarakat adalah :

“ upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan atau memandirikan masyarakat”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan model yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat khususnya di Indonesia. Dengan proses pemberdayaan diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk berperilaku mandiri yang berorientasi pada perbaikan mutu hidup (kesejahteraan). Mandiri atau kemandirian masyarakat dipahami bukan sebagai masyarakat yang terpisah atau “eksklusif” dari bagian komunitas lainnya tetapi lebih pada pemahaman bahwa masyarakat itu memiliki kemampuan untuk “bangkit” menjadi dirinya sendiri yang bermartabat dan tidak selalu dianggap sebagai orang atau kelompok pinggiran. Seperti disampaikan oleh Prof. Soebroto dalam pendahuluan di atas bahwa upaya untuk dapat menjadi masyarakat yang mandiri perlu bergotong royong dan kebersamaan dengan pihak-pihak terkait.

3. Peran dan Proses Assessment dalam Pemberdayaan

Assessment dalam pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan “melihat” lebih awal atau mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan potensi yang ada dalam masyarakat sebagai dasar dalam merancang kegiatan bersama dengan masyarakat (mitra). Dengan proses ini diharapkan program atau kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau permasalahan dalam masyarakat. Selain itu dengan proses assessment ini diharapkan masyarakat juga merasa memiliki dan oleh karena itu juga ikut bertanggungjawab atas keberhasilan kegiatan tersebut. Disinilah pentingnya peran assessment dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Assessment kebutuhan dan potensi pada masyarakat di Atambua pada dasarnya dilakukan secara kualitatif dengan melihat langsung kehidupan dan sumber atau potensi kehidupan masyarakat di Atambua.

Dalam assesment ini fokus pada empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan lingkungan. Untuk keperluan penulisan dalam seminar ini difokuskan pada bidang pendidikan dan sosial ekonomi. Bidang pendidikan terutama pada institusi pendidikan yang dikelola oleh Yayasan As'Tanara wilaya Keuskupan Atambua NTT. Assesment dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dan didiskusikan dengan "contact persons". "Contact persons" adalah tokoh masyarakat yang cukup disegani oleh masyarakat dan menjadi panutan masyarakat. Assesment dilakukan selama 4 hari. Tentu saja hasilnya jauh dari sempurna, namun demikian dapat diperoleh gambaran atau informasi secara garis besar tentang potensi, permasalahan dan harapan masyarakat. Selain itu digunakan juga data sekunder hasil olah statistik masyarakat Atambua. Hasil diskusi inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk merancang kegiatan atau program pengabdian pada masyarakat di Atambua, NTT.

4. Hasil dan Rekomendasi Program

Dari hasil kunjungan langsung dengan melakukan wawancara, hasil diskusi dan data sekunder diperoleh gambaran sebagai berikut :

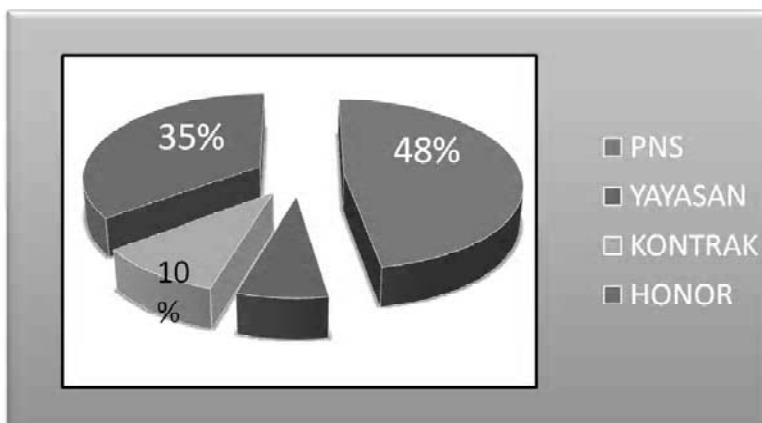
a. Bidang Pendidikan

Berdasarkan data sekunder diperoleh gambaran sebagai berikut :

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid

	Sekolah	Guru	Murid
TK	5	12	160
SD	49	415	7.331
SLTP	3	64	1.207
SLTA	1	49	915

Persentasi Status Guru



Dari data sekunder di atas dapat diketahui bahwa perbandingan antara guru dan murid dari SD hingga SLTA sekitar 1:20. Tetapi bila dilihat dari hasil lulusan Ujian Akhir Nasional dua tahun terakhir meskipun masih menjadi pro dan kontra, daerah NTT termasuk dalam kategori rendah. Dari hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber dan tokoh masyarakat (pendidik) di Atambua maka perlu diberikan program "penyegaran" bagi guru-guru di lingkungan Yayasan As'Tanara Atambua.

b. Bidang Sosial ekonomi

Matapencaharian utama masyarakat di Atambua adalah bertani. Sebagian besar bertanam jagung dan hanya sebagian kecil yang bercocok tanam (padi) sawah tadah hujan dan kedelai. Dari hasil diskusi dengan tokoh masyarakat, ada wilayah (tidak sempat mengunjungi) yang cocok untuk tanaman kedelai dan sebagian masyarakatnya sudah mulai menanamnya. Selain itu masyarakat Atambua juga beternak terutama babi dan sebagian kecil sapi. Ada juga masyarakat yang menjadi nelayan di daerah Atapupu dan Wini. Ada sebagian kecil masyarakat yang berjualan di pasar yaitu di pasar baru (pusat kota Atambua) dan di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional berlangsung satu kali dalam satu minggu, bergantian dari satu tempat (desa/kecamatan) ke tempat yang lain. Biasanya berlangsung hanya sekitar 3 sampai 4 jam saja (mulai pagi hari). Mereka terutama menjual hasil pertanian (sayur, kacang-kacangan dan ternak). Sebagian kecil ada yang usaha membuka “warung kelontong” di daerah perbatasan dengan Timor Leste. Ada sebagian masyarakat di daerah Kefa, yang membuat kerajinan tradisional tenun (kain tenun). Untuk sementara di jual di sekitar kota Atambua atau sesuai dengan pesanan. Selain itu juga ada yang menjadi penjahit pakaian dan bahkan ada yang cukup bagus sehingga menjadi langganan para pejabat khususnya di Kabupaten Atambua.

Dalam bidang pendanaan, di Atambua selain ada bank-bank konvensional juga telah berdiri CU (Credit Union). Lembaga ini yang juga ikut membantu memfasilitasi masyarakat secara berkelompok dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. Masyarakat yang diberi bantuan terutama yang memiliki kegiatan ekonomi secara kelompok, misalnya petani, perternak dan pedagang. Mengapa yang berkelompok ?? terutama agar bagi mereka tertanam nilai saling berbagi rasa kebersamaan satu dengan yang lain, saling membantu, peduli dengan yang lain. Bagi CU akan lebih mudah dalam memberikan “pengarahan”. Selain itu juga akan tercipta “kontrol sosial” yang sinergis satu dengan yang lain. Sebagai contoh apabila ada salah satu anggota yang belum memenuhi “kewajibannya” maka sanksi juga akan dikenakan pada anggota kelompok lain lain, yaitu tidak boleh mengambil pinjaman baru sebelum lunas semua.

Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat setempat dan berdasarkan ketersediaan ahli di Unika Atma Jaya maka akan dilakukan pelatihan pembuatan tempe dan beberapa varian olahan tempe. Pelatihan ini dilakukan kepada Keluarga sebagai kader yang diambil dari wilayah-wilayah atau (lingkungan) dengan harapan dapat menjadi penggerak di wilayahnya masing-masing. Kedepan diharapkan menjadi wirausaha (kewirausahaan) berbasis keluarga.

5. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa assessment dalam proses pemberdayaan sangat penting. Dengan demikian program pengabdian diharapkan dapat sesuai dengan harapan masyarakat (mitra). Di bidang pendidikan dalam rangka memberikan “penyegaran” pada guru-guru di lingkungan sekolah yang dikelola Yayasan As’Tanara maka PPM-LPPM Unka Atma Jaya akan memberikan seminar sekaligus pelatihan tentang “Profesionalisme Guru”. Di bidang Ekonomi akan dilakukan pelatihan pembuatan tempe dan beberapa varian olahan tempe menjadi produk makanan yang lebih “menarik” sekaligus menyehatkan (sehat) berbasis pada keluarga. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari atau Maret 2015.

Daftar Pustaka

- D.C. Korten dan Syahrir (ed.), *Pembangunan berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Dewanta, Awan Setya. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: **Penerbit Aditya Media**.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta:CIDES.
- Mardikanto, Totok. dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat, dalam perspektif*

kebijakan publik, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Ruslan, Malik, dan Anwar WMK. 2006. *Pemikiran Prof. Dr. Haryono Suyono : Pembedayaan Masyarakat, Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Rian Nugroho. 2002. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Suharsono. *Laporan hasil seminar, "Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Belajar dari Kearifan Lokal Bali"*, 14-17 November 2014.

Lampiran : Foto Kegiatan di Atambua



Diskusi dengan Tokoh Masyarakat



Pasar hasil pertanian Atambua



Pedagang di Pasar Atambua



Kantor Pusat CU



Kantor Yayasan As'Tanara



Potensi tanaman jagung

